

**CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANDATORY DISCLOSURE IMPLEMENTASI
KONVERGENSI IFRS**

Ismunawan¹

Eko Triyanto^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta Indonesia

Email :Wanismu@ymail.com

Abstract

The purpose of this research is to investigate the influence of corporate governance mechanisms to mandatory disclosure IFRS on companies listed on the Stock Exchange. Corporate governance mechanisms used in this study include: managerial ownership, institutional ownership, the proportion of independent board, the number of members of the audit committee, board of directors, and board meetings. The sample used in this research is manufacturing companies listed on the Stock Exchange in the year 2013-2015. The total sample is 102 companies were determined by purposive sampling method.

These results indicate that the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS in the manufacturing companies is 54,89%. This study uses multiple regression analysis to examine the effect of corporate governance mechanisms to mandatory disclosure IFRS. The results of this study indicate that managerial ownership and institutional ownership has significant negative effect on mandatory disclosure IFRS, whereas commissioners significant positive effect on the mandatory disclosure IFRS. The variable proportion of independent board, the number of members of the audit committee and board meetings does not affect the mandatory disclosure IFRS.

Keywords: Mandatory disclosure, corporate governance mechanisms

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan independen, jumlah anggota komite audit, dewan direksi, dan rapat dewan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2013-2015. Total sampel sebanyak 102 perusahaan ditentukan dengan metode purposive sampling.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dengan konvergensi pengungkapan wajib IFRS di perusahaan manufaktur adalah 54,89%. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS, sedangkan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Proporsi variabel dewan independen, jumlah anggota komite audit dan rapat dewan tidak mempengaruhi pengungkapan wajib IFRS.

Kata kunci: Pengungkapan wajib, mekanisme tata kelola perusahaan

PENDAHULUAN

Entitas multinasional di Indonesia berkomitmen melaporkan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK yang konvergen dengan IFRS. Per 1 Januari 2012 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan (DSAK IAI) telah berhasil menyelesaikan proses konvergensi tahap pertama, hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri agar lebih mudah untuk mendapat tambahan modal. Penerapan laporan keuangan yang konvergen dengan IFRS di Indonesia membutuhkan waktu karena budaya pasti akan berpengaruh dalam implementasi dimana IFRS dirancang di negara maju sementara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang.

Corporate governance (tata kelola) dalam menjalankan operasional sebuah entitas sangat penting untuk keberlangsungan sebuah usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dari waktu ke waktu. *Corporate governance* yang baik juga akan memberikan dampak dalam penyajian laporan keuangan setiap periode terlebih pada perusahaan yang memperoleh tambahan modal dari pihak eksternal. Laporan keuangan yang baik akan memberikan informasi yang lengkap dan transparan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Mandatory disclosure atau pengungkapan wajib yang harus dilaporkan oleh sebuah emiten adalah laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan lampiran SK BAPEPAM NO. 2 Tahun 2002 tentang standar laporan keuangan investasi menyebutkan bahwa karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang perseorangan tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menguji pengaruh penerapan IFRS dan perlindungan investor terhadap kualitas laba akuntansi di empat puluh enam negara di seluruh dunia. Dua sifat laba akuntansi yang dipelajari: besarnya akrual diskresioner, dan kualitas akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFRS adopsi tidak menyebabkan peningkatan kualitas laba, setidaknya berdasarkan sifat laba dipertimbangkan dalam penelitian. Namun, penelitian menemukan bahwa kualitas laba meningkat dengan perlindungan investor yang kuat dan perlindungan investor memediasi efek adopsi IFRS.

Hasil penelitian menyoroti pentingnya perlindungan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kebutuhan pembuat standar dan pembuat kebijakan untuk merancang mekanisme yang akan membatasi manajer dalam praktik manajemen laba (Hoque *et al.*, 2010).

Menurut Yip and Young (2012), Penerapan wajib Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) di Uni Eropa secara signifikan meningkatkan komparabilitas informasi di 17 negara Eropa. Penelitian menggunakan tiga proksi kesamaan fungsi akuntansi yang menerjemahkan peristiwa ekonomi menjadi data akuntansi, tingkat transfer informasi, dan kesamaan isi informasi laba dan nilai buku ekuitas untuk mengukur perbandingan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi wajib IFRS meningkatkan nilai banding informasi lintas negara dengan membuat hal serupa terlihat lebih mirip tanpa membuat hal yang berbeda terlihat kurang berbeda. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa kedua konvergensi akuntansi dan informasi yang berkualitas tinggi di bawah IFRS adalah memungkinkan peningkatan komparabilitas. Selain itu, penelitian menemukan beberapa bukti bahwa peningkatan komparabilitas lintas negara dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan perusahaan.

Bank memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan untuk melaporkan tata kelola perusahaan mereka dalam laporan perusahaan. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi pengungkapan mekanisme tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia. Mekanisme tata kelola perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komite, pengendalian audit internal dan eksternal, dan manajemen risiko. Mempekerjakan sampel yang terdiri dari tujuh bank umum syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan *Corporate Governance* Indeks Pengungkapan (CGDI) untuk menilai tingkat pengungkapan bank. Pengungkapan bank sampel pada beberapa dimensi, seperti anggota dewan dan manajemen risiko, memiliki pengaruh yang kuat. Di sisi lain, pengungkapan pada pengendalian dan dewan komite internal cenderung lemah. Hasil penelitian ini mungkin memiliki beberapa implikasi penting untuk peningkatan pengungkapan tata kelola perusahaan bank syariah, penerimaan yang lebih luas dan reputasi yang meningkat (Darmadi, 2013).

Mekanisme *corporate governance* dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sebuah emiten memiliki hubungan secara tidak langsung namun memiliki peran yang

cukup erat dimana *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan akan sangat terbantu dengan adanya *corporate governance* yang baik dari sebuah emiten.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

“Teori keagenan (*agency theory*) menganalisis hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer)” (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut memunculkan suatu masalah yang mungkin terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari manajer yang menjalankan operasional perusahaan. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah konflik (masalah keagenan) yang akan berdampak buruk pada perusahaan. Konflik yang terjadi akan menimbulkan biaya keagenan yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Untuk meminimalisasikan biaya keagenan mekanisme tata kelola berperan sebagai sistem untuk mencegah terjadinya konflik dalam operasional perusahaan.

Biaya keagenan merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal, (2) biaya perikatan (*bonding cost*) oleh agen, maupun (3) kerugian residual (*residual cost*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

Saripudin (2014) menerangkan “Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.” Sedangkan menurut Imanta (2011) definisi kepemilikan manajerial adalah: “Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.”

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Murwaningsari (2010) melalui penelitiannya membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* yang diamati melalui kepemilikan manajerial dan institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana CSR merupakan pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

Penelitian yang dilakukan Rouf dan Al-Harun (2011) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional yang besar akan membuat tingkat pengungkapan wajib juga semakin banyak. Semakin besar kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan wajib IFRS sehingga keputusan-keputusan yang diambil manajemen dapat dipantau agar keputusan yang diambil memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

“Proporsi komisaris independen menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.” (Prawinandi dkk., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari, 2003). Semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan meningkatkan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₃: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Penelitian Ika dan Hayati (2016) membuktikan bahwa: “Jumlah anggota komite audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib sehingga semakin tinggi jumlah anggota komite audit semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perusahaan mengungkapkan *mandatory disclosure* dalam laporan tahunan.” Hasil penelitian Al-Akra *et al.*, (2010) di Yordania menunjukkan bahwa jumlah komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₄: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (POJK NO.33/POJK.04/2014). Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewi (2015) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* dimana CRS merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian Al-Akra *et al.*, (2010) di Aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₅: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) IFRS

Tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *mandatory disclosure* dengan penerapan IFRS (Sutiyok, 2016). Penelitian Ettredge *et al.*,

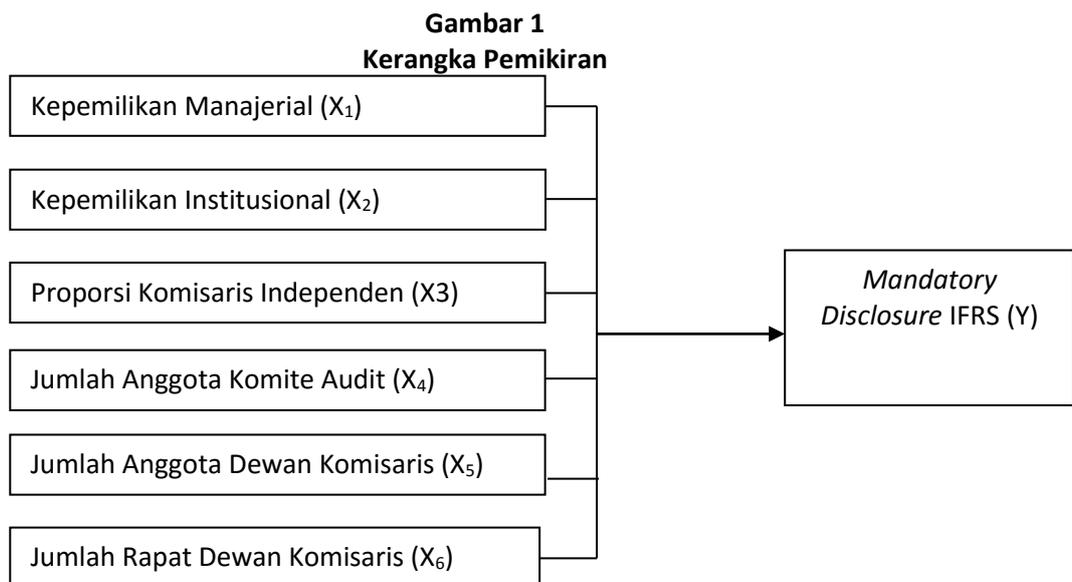
(2010) menemukan bahwa dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Penelitian Prastiti (2013) menerangkan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₆: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS perusahaan manufaktur

Kerangka Pemikiran

Adapun dalam pemikiran ini dapat digambarkan variabel-variabel yang saling berkaitan dan dikaji melalui skema berikut:



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, *mandatory disclosure* dapat diartikan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, *mandatory*

disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Identifikasi item pengungkapan menggunakan *checklist* BAPEPAM LK 2013. Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0, serta N/A jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan (Apostolou dan Nanopoulos, 2009). Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS adalah:

$$\text{MANDSCORE} = \frac{\sum \text{Klasifikasi yang Diungkapkan} \times 100\%}{\sum \text{Item yang harus Diungkapkan}}$$

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

1. Kepemilikan Manajerial

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Huafang, 2007).

$$\text{KEPMAN} = \frac{\sum \text{Saham Dimiliki Pihak Manajemen} \times 100\%}{\sum \text{Saham yang Beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Sesuai dengan Barako (2007) serta Rouf (2011), kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

$$\text{KEPINS} = \frac{\sum \text{Saham Kepemilikan Institusional} \times 100\%}{\sum \text{Saham yang Beredar}}$$

3. Proporsi Komisaris Independen

Indikator untuk mengukur proporsi komisaris independen dalam penelitian ini adalah persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel (Sefiana, 2009).

$$\text{KOMIND} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen} \times 100\%}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

4. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Prawinandi dkk., 2012).

$$\text{KOMAUDIT} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

5. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014). Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris perusahaan (Sefiana, 2009).

$$\text{KOM} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$$

6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat formal yang kuorum Dewan Komisaris dalam setahun (Hadiprajitno, 2013).

$$\text{RDK} = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris dalam setahun}$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI untuk masing-masing tahun periode 2013-2015.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam periode 2013-2015.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Studi Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas, Uji multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS, sehingga model penelitian yang dibentuk adalah:

$$\text{MANDSCORE} = b_0 + b_1\text{KEPMAN} + b_2\text{KEPINS} + b_3\text{KOMIND} + b_4\text{KOMAUDIT} \\ + b_5\text{KOM} + b_6\text{RDK} + e$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah 102 sampel selama periode pengamatan 2013, 2014 dan 2015. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 17.0 dari variabel-variabel penelitian ini disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
MANDSCORE (%)	102	43,06	67,36	54,89	5,95
KEPMAN (%)	102	0,00	70,00	3,99	12,51
KEPINS (%)	102	0,00	98,95	67,84	20,10
KOMIND (%)	102	20,00	66,67	40,13	10,40
KOMAUDIT	102	0,00	4,00	3,00	0,34
KOM	102	2,00	13,00	4,31	2,20
RDK	102	0,00	24,00	5,03	3,58
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data yang telah diolah

Pengujian Hipotesis

Pengujian regresi berganda yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
(Constant)	65,629	12,649	0,000
KEPMAN	-0,181	-3,824	0,000
KEPINS	-0,132	-4,381	0,000
KOMIND	-0,69	-1,452	0,150
KOMAUDIT	-1,483	-1,054	0,295
KOM	1,483	6,465	0,000
RDK	-0,45	-0,327	0,745
R Square	0,455		
Adjusted R Square	0,421		
F	13240		
Sig.	0,000		

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besar nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,421 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen sebesar 42,1%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure* dipengaruhi variabel kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, jumlah komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,000 < 0,05 dan koefisien negatif 0,181). Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, maka *mandatory disclosure* IFRS yang diungkapkan akan semakin kecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan, dimana pemegang saham pengendali dapat mengambil alih hak pemegang saham minoritas dengan menyimpan informasi yang dianggap penting untuk kepentingan pribadi.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Kepemilikan institusi berpengaruh signifikan negatif terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,000 > 0,05 dan koefisien negatif 0,132). Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi justru akan memperkecil *mandatory disclosure* IFRS dan sebaliknya semakin kecil kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, maka *mandatory disclosure* IFRS akan semakin meningkat. Penelitian Setiawan (2014) juga menunjukkan hal yang sama dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tahunan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Primastuti (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi strategis.

H₃: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,150 < 0,05 dan koefisien negatif 0,69). Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini bertolak

belakang dengan penelitian Prawinandi (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Peran dewan komisaris independen sebagai pengawas manajemen belum optimal dikarenakan keberadaan komisaris independen dibentuk hanya untuk memenuhi ketentuan atau regulasi saja tetapi tidak untuk menegakkan *good corporate governance* (Limantauw, 2012).

H₄: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,295 > 0,05 dan koefisien negatif 1,483). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2014) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ika (2016), menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib.

Jumlah komite audit yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK paling sedikit adalah 3 anggota dalam penelitian ini jumlah anggota komite tidak berpengaruh signifikan dimana bisa diasumsikan bahwa komite audit dibentuk belum sepenuhnya memiliki kontribusi untuk memberikan pengaruhnya dalam mengevaluasi laporan keuangan yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan anggota komite audit dibentuk untuk memenuhi peraturan dari pemerintah tentang minimal jumlah anggota komite audit yang harus dimiliki. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sutiyok (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan.

H₅: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,000 < 0,05 dan koefisien positif 1,483). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka *mandatory disclosure* IFRS dari laporan keuangan yang diterbitkan akan semakin besar atau lengkap. Muntoro (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa "*Two heads is better than one*", yang memiliki arti semakin besar resiko dan ancaman yang akan dihadapi

oleh perusahaan dapat diatasi jika semakin banyak yang memikirkan dan memantau kondisi perusahaan.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutyok (2016) bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan. Sistem informasi yang handal menghasilkan informasi yang handal pula. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang menjadi kebutuhan utama dewan komisaris. Oleh karena itu, mengawasi proses penyusunan laporan keuangan adalah salah satu tugas yang penting bagi dewan komisaris (Muntoro, 2006).

H₆: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) IFRS

Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* IFRS (*p-value* 0,745 dan koefisien negatif 0,45). Penelitian ini sejalan dengan Utami dkk.(2012) bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib IFRS yang berarti berapapun jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya seorang atau lebih komisaris yang mendominasi jalannya rapat baik itu oleh komisaris utama maupun oleh anggota dewan komisaris yang lain (Muntoro, 2006).

Bertolak belakang dengan penelitian yang lain dimana rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi* IFRS pada perusahaan perbankan (Sutyok, 2016). Rapat dewan komisaris lebih menyerupai pemenuhan langkah-langkah formalitas, yang tujuan utamanya bukan mencari solusi terbaik bagi perusahaan, melainkan untuk memberi justifikasi bagi keputusan yang diambil, yang sebenarnya sudah diarahkan ke suatu arah tertentu (Muntoro, 2006).

SIMPULAN

Corporate governance merupakan prinsip yang sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan *going concern*. Dalam konsep GCG, perusahaan diharuskan untuk memenuhi prinsip yang akan membangun tata kelola perusahaan yang baik yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut salah satu kewajiban perusahaan adalah melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat,

tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Dengan terwujudnya GCG ini diharapkan akan membawa bisnis perusahaan ke arah yang lebih baik sehingga akan memberikan motivasi agar perusahaan mengungkapkan *mandatory disclosure* IFRS dengan lebih lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dewan komisaris, dan rapat dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi *mandatory disclosure* IFRS hanya sebesar 42,1%. Dengan demikian mekanisme *corporate governance* tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *mandatory disclosure* IFRS laporan keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure* IFRS. Variabel yang lain yaitu proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* IFRS. Diketahui juga bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* IFRS adalah keberadaan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aharony, Joseph, Ran Barniv, and Haim Falk, (2010), "The impact of mandatory IFRS adoption on equity valuation of accounting numbers for security investors in the EU", *European Accounting Review* 19.3, 535-578.
- Al-Akra, M., I. A., Eddie and M. J. Ali, (2010), "The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan", *The British Accounting Review*, 7 (1): 1-20.
- Al-Fayoumi, N., B. Abuzayed and D. Alexander, (2010), "Ownership Structure and Earnings Management In Emerging Markets: The Case of Jordan", *International Research Journal of Finance and Economics* (38):28-47.
- Alvionita, Intan dan Taqwa Salma, (2015), "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory

Disclosure”, *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

Apostolou, A.K. and K.A. Nanopoulos, (2009), “Voluntary Accounting Disclosure and Corporate Governance: Evidence From Greek Listed Firms”, *International Journal Accounting and Finance*, 1(4), 395-414.

Apriliani, A. N., (2012), “Kajian Kualitas Pelaporan Second Order Terhadap Asimetri Informasi”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1 No.1, Hal 20-26.

Arikunto, Suharsimi, (2013), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Barako, D.G., (2007), “Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports”, *African Journal of Business Management*, 1(5): 113-128.

Barnae, Amir and Amir Rubin, (2005), “Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Owners”.

Bhattacharjee, S., (2009), “Problems of adoption and application of international financial reporting Standards (IFRS) in Bangladesh”, *International Journal of Business and Management*, 4(12), 165.

Brigham, Eugene F., and Michael C. Ehrhardt. 2005. *Financial management Theory and Practice*. Infotrac College Edition, South-Western, United States of America.

Choi Frederick D.S. dan Gary K. Meek, (2010). *Akuntansi Internasional*, Jakarta, Salemba Empat.

Daniri, Mas Achmad, (2005), *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, Jakarta, Ray Indonesia.

Darmadi, S., (2013), “Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks”, *Humanomics*, 29(1), 4-23.

Dewi, S. S., (2015), “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2(3).

Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone and Q. Wang, (2010), “The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance”, *Review of Accounting Studies*, Forthcoming: 1-34.

Faizal, (2004), “Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance”, *Simposium Nasional Akuntansi VII*.

- Gamayuni, Rindu Rika, (2009), "Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 14, Nomor 2, 153-166.
- Ghozali, Imam, (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, I Welvin dan Arleen Herawaty, (2010), "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, April 2010, Hlm. 53-68.
- Hadiprajitno, Basuki, (2013), "Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan biaya keagenan Indonesia", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 9, No. 2, Mei 2013: 97 – 127.
- Hardiningsih, P., (2010), "Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan", *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*, 2(1).
- Hikmah, N., dan Rahmayanti D., (2011), Faktor-Faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI, *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 1-32.
- Houque, M. N., van Zijl, T., Dunstan, K., & Karim, A. W., (2012), "The effect of IFRS adoption and investor protection on earnings quality around the world", *The International Journal of Accounting*, 47(3), 333-355.
- Huafang, X. and Y. Jianguo, 2007, "Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in China", *Managerial Auditing Journal*, 22(6): 604-619.
- Ika, S. R., (2016)., "Kepatuhan Perusahaan Publik Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Dan Faktor-Faktor Corporate Governance Yang Mempengaruhinya", *Efektif Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 58-75.
- Imanta, Deadan Rutji Satwiko, (2011), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 13, No. 1, April 2011, Hlm. 67-80.
- Isnanta, Rudi, (2008), "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan", Yogyakarta, UII.
- Jensen, M.C., (1986), "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers", *American Economic Review*, Vol 76, No.2, pp. 323-329.

- Kartikahadi, Hans dkk, (2012), *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*, Jakarta, Salemba Empat.
- Kent, P., & Stewart, J., (2008), "Corporate governance and disclosures on the transition to international financial reporting standards", *Accounting & Finance*, 48(4), 649-671.
- Kuncoro, Mudrajad, (2011), *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Limantau, S., (2012), "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Sebagai Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 48-52.
- Mayangsari, Sekar, (2003), "Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan", *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Melinda, Ida Fong dan Bertha Silvia Sutejo, (2008), "Interdependensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan", *Manajemen & Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, September 2008.
- Muntoro, R. K., (2006), "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif", *Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Murwaningsari, Ety, (2010), "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Nuswandari, Cahyani, (2009), "Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 16, No.2, Hal. 70 - 84 ISSN: 1412-3126.
- Prastiti, Anindyah, (2013), Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba, *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Prawinandi, dkk, (2012), "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS", *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1-26.

- Primastuti, S., & Achmad, T., (2012), "Pengaruh corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis (studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI)", (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Rahmawati, dkk, (2006), "Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik", *Simposium Nasional Akuntansi 9*.
- Rouf, A. and A. Al-Harun, (2011), "Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh", *Pakistan Journal of Commerce and Social Science*, 5 (1), 129- 139.
- Santoso, D., (2008), "Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(2).
- Saputra, Edi, (2015), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Dan Implikasinya Terhadap Asimetri Informasi", *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Saripudin, Arif, (2014), "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)", *Diss. Fakultas Ekonomi Unpas*.
- Sefiana, Eka, (2009), "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang telah Go Public di BEI", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*, 12.3, 211-222.
- Sekaran, Uma. (2011), *Research Methods for business Edisi 1 and 2*, Jakarta, Salemba Empat.
- Setiawan, Andriani Linda, (2014), "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas pada Luas Ungkapan dalam Laporan Tahunan", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 7 (2014), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Siregar, B, (2008), "Ekspropriasi Pemegang Saham Minoritas dalam Struktur Kepemilikan Ultimat", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(3), 237-263.
- Siregar, Sylvia dan Siddharta Utama,(2005),"Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)",*Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Hlm: 480-496.
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.

- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Sukirni, Dwi, (2012), "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan", *Accounting Analysis Journal*, 1.2.
- Suprihatin, Siti dan Elok Tresnaningsih,(2013),"Dampak Konvergensi International Financial Reporting Standards Terhadap Nilai Relevan Informasi Akuntansi",*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 10, Nomor 2.
- Susiana dan Herawaty A., (2007), "Analisis pengaruh Independensi. Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan", *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Sutyok, Evi Rahmawati, (2016), "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15.2, 151-162.
- Utami, Wulan Dwi, Djoko Suhardjanto dan Sri Hartoko, (2012), "Investigasi dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance", *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Wening, Kartikawati,(2009), "Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Wibowo, E., (2012), "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia", *Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2).
- Widarjono, Agus, (2015), *Satistika Terapan Dengan Excel & SPSS*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Wiyono, Gendro, (2011),*3 in One Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Wulandari, N. P., & Budiarta, I. K., (2014), "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan", *E-Jurnal Akuntansi*, 7(3), 574-586.
- Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan, (2014), *SPPS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS Edisi 2*. Jakarta Selatan, Salemba Infotek.

Yip, Rita WY, and Danqing Young, (2012), "Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?", *The Accounting Review* 87.5, 1767-1789.